**KEPENTINGAN INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI
MELALUI APSC (ASEAN *POLITICAL-SECURITY COMMUNITY*)**

Oleh :

ARWIYANTO JODY AMALINO¹
(arwiyantojodya@gmail.com)

Pembimbing : Irwan Iskandar, S.IP, MA.

Bibliografi : 5 Jurnal dan/atau *Working Paper*, 2 Skripsi/Disertasi, 9 Buku, 3 Hasil Wawancara, 4 Dokumen Resmi, 3 *Website Primer*, dan 4 Sekunder

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau, Pekanbaru
Kampus Bina Widya JL. HR Subrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru
28293
Telp/Fax: 0761-63272

Abstract

This research discusses about the national interest of Indonesia in corruption eradication agenda through ASEAN Political-Security Community. As a nation, Indonesia has been trying to eradicate corruption because it has been ruining Indonesia's vision to ensure the prosperity and security of its people. The eradication agenda became priority as the level and impact of corruption escalated drastically in Soeharto's reign and fall. Corruption becomes more complex as it involves international actors and using more complicate methods. Indonesia realized that different approach should be used to strengthen the eradication agenda, especially to use international cooperation.

Researcher focused on the national interest of Indonesia that became a prominent factor of Indonesia to propose the corruption and non traditional security issues in the building process of ASEAN Community. It resulted on agreement to make a pillar of the community that focus on politic and security issues, namely as ASEAN Political-Security Community (APSC). The formulation of this research based on Rationalism perspective on International Relations, supported with various theories and concepts, such as national security, national interest, corruption and cooperation, arguments and facts.

This research answered the hypothesis made by researcher that revealed ASEAN Political-Security Community becomes one of the instruments that can be used to strengthen the eradication of corruption agenda. It contains cooperation between ASEAN Member States on prevention and combat corruption, the establishment of good governance, and also to deal with the issues of transnational organized crimes.

Keywords : Indonesia, national interest, corruption, security, ASEAN, ASEAN Political-Security Community

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau angkatan 2012

I. Pendahuluan

Korupsi merupakan suatu permasalahan yang sangat mengkhawatirkan bagi negara-negara di dunia saat ini, tidak terkecuali Indonesia. Tingkat korupsi di Indonesia pada era reformasi dapat dilihat dari hasil Indeks Persepsi Korupsi yang dilakukan oleh *Transparency Internasional* dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004-2014, peringkat dan penilaian terhadap Indonesia termasuk sebagai negara yang rawan akan korupsi dan tidak begitu baik (peringkat 133-107)².

Korupsi merupakan kata serapan dari kata *corrupt* yang berarti rusak dan hal senada juga diutarakan tentang korupsi di dalam bahasa Arab yang menyatakan korupsi sebagai *fasad*. Menurut Sukron Kamil dalam konteks ini korupsi merupakan tindakan yang merusak sistem dan hak-hak politik, ekonomi dan hukum³. Pendapat ini melihat dari implikasi yang ditimbulkan oleh korupsi sebagai suatu tindakan yang melawan hukum.

Permasalahan tentang seberapa berbahayanya korupsi dapat dilihat dari pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus korupsi. Pada Oktober 2004 hingga Juli 2012 ada begitu banyak pejabat daerah dan penyelenggara negara yang terlibat hal ini. Setidaknya ada sekitar 277

orang pejabat daerah dan jika ditotalkan dengan bawahannya sekitar 1500 orang yang terlibat di dalam kasus korupsi⁴.

Kasus korupsi lintas negara saat ini sudah bermunculan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan terungkapnya kasus korupsi yang melibatkan aktor-aktor internasional, khususnya *Multi National Corporation*, seperti kasus penyuapan oleh Innospec Ltd. terhadap Pertamina dan Kernel Oil Ltd. terhadap SKK Migas. Oleh karena itu, pada saat ini kasus korupsi dapat digolongkan sebagai kejahatan lintas batas (*Transnational Crime*).

Pemberantasan korupsi pada saat ini membutuhkan kerja sama dengan aktor-aktor internasional. Hal ini didasarkan atas keterbatasan yang dimiliki oleh suatu negara, terutama terhadap wilayah penegakan hukum yang terbatas di dalam penindakan untuk pemberantasan korupsi.

Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN berupaya untuk meningkatkan integrasi diantara mereka melalui pembentukan ASEAN *Community* 2015. Integrasi di dalam komunitas ini dipusatkan kepada beberapa komponen yang juga menjadi pilarnya, yaitu politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya. Peningkatan integrasi ini diharapkan dapat membantu penyelesaian berbagai permasalahan dan tantangan yang ada, termasuk

² Transparency International. 2015. *Corruption Perception Index*. Transparency.org

(<http://www.transparency.org/research/cpi>) diakses 15 April 2015

³ Kamil, Sukron. 2013. *Korupsi dan Integritas dalam Ragam Perspektif*. Jakarta: PSIA UIN Syarif Hidayatullah. Hal. 25-27

⁴ Badudu, Ananda. 2012. *Ribuan Pejabat Daerah Terlibat Kasus Korupsi*. (<http://tempo.co/read/news/2012/08/29/07842651/Ribuan-Pejabat-Daerah-Terlibat-Kasus-Korupsi>) diakses pada 2 November 2014

pemberantasan korupsi. Hal ini disetujui melalui pembentukan salah satu pilar ASEAN *Community*, yaitu ASEAN *Political-Security Community*.

Meskipun demikian, sebenarnya Indonesia sudah memiliki beberapa instrumen di dalam pemberantasan korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Kepolisian Republik Indonesia. Ketiga lembaga ini juga dapat meminta atau menerima bantuan dari lembaga-lembaga pemerintahan lainnya di dalam konteks pemberantasan korupsi, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) serta lembaga lainnya.

Indonesia juga melakukan kerja sama dengan aktor-aktor internasional dalam permasalahan kejahatan transnasional dan juga korupsi, seperti *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC), *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC), *ASEAN Declaration on Transnational Crime*, dan *Manila Declaration on the Prevention and Control of Transnational Crime*.

Walaupun begitu, Indonesia juga mulai melakukan perluasan kerjasama terhadap pihak-pihak yang merupakan negara-negara anggota ASEAN dalam upaya memberantas korupsi dan juga mendukung kestabilan kawasan Asia Tenggara. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan APSC.

Berdasarkan dari beberapa latar belakang yang penulis paparkan, maka penulis mencoba membuat sebuah pertanyaan penelitian: Mengapa Indonesia mengupayakan pemberantasan korupsi melalui APSC (ASEAN Political-Security Community)?.

Kerangka Teori

Perspektif yang digunakan di dalam penelitian ini adalah perspektif rasionalisme dalam Hubungan Internasional. Rasionalisme merupakan perspektif yang dikenal juga dengan *English School* yang menggabungkan atau menengahi pemikiran dari realisme dan juga liberalisme. Perspektif ini mengakui bahwa sistem dunia internasional itu bersifat anarkis (realisme), tapi tidak menutup kemungkinan untuk negara atau aktor negara untuk saling bekerjasama dan juga asas solidaritas (liberalisme)⁵.

Penggunaan rasionalisme dikarenakan perspektif ini menganggap peran negara sebagai sesuatu yang penting, namun juga tidak melupakan peran aktor non-internasional. Selain itu, pada dasarnya perspektif ini menitikberatkan terhadap *ratio* (pertimbangan) dari suatu aktor internasional dalam menanggapi suatu isu yang sedang atau akan dihadapi dengan berbagai tindakan.

Penelitian ini diformulasikan melalui perspektif rasionalisme, teori korupsi, keamanan nasional dan

⁵ Murray, Robert W. 2013. *System, Society & the World: Exploring the English School of International Relations*. Bristol: E-International Relations. Hal. 8-9

kepentingan nasional. Selain itu, tingkat analisa yang digunakan di dalam penelitian ini adalah tingkat negara dan bangsa.

Korupsi sudah menjadi ancaman dari sisi keamanan non-tradisional mengganggu keberlangsungan Indonesia sebagai suatu negara. Secara mendasar, ketika ancaman muncul maka hal ini akan mengganggu keamanan yang menjadi kepentingan nasional dari suatu negara. Keamanan menentukan hidup (keberlangsungan) dan mati (kehancuran) suatu negara. Oleh karena itu, untuk memenuhi nilai-nilai kepentingan nasionalnya, Indonesia diharuskan melakukan berbagai cara untuk memastikan hal tersebut dan salah satunya adalah upaya pembentukan APSC.

II. ISI

Korupsi merupakan permasalahan yang kompleks di dalam suatu negara dan hal ini juga dirasakan oleh Indonesia. Definisi korupsi menurut Joseph S. Nye adalah suatu tindakan yang menyimpang dan juga pelanggaran aturan oleh para penyelenggara negara untuk mendapatkan keuntungan ekonomi maupun status dan hal ini berbentuk penyuapan, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang⁶.

Keberadaan korupsi tidak akan ada jika tidak ada faktor-faktor penyebab dan pendorong. Pendapat

para ahli mengungkapkan berbagai penyebab atas munculnya korupsi. Jack Bologne mengungkapkan bahwa setidaknya ada empat, yaitu, *Greeds* (Keserakahan), *Opportunities* (Kesempatan), *Needs* (Kebutuhan) dan *Exposures* (Pengungkapan)⁷.

Selain Bologne, Syed Husein Alatas juga menyampaikan beberapa yang menjadi penyebab terjadinya korupsi ini, antara lain⁸:

1. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
2. Pengaruh kolonialisme yang membentuk karakter ketidaksetiaan dan juga ketidakpatuhan untuk membendung korupsi.
3. Kurangnya pendidikan.
4. Kemiskinan.
5. Tidak adanya sanksi yang keras dan membuat jera.
6. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
7. Struktur pemerintahan.
8. Perubahan radikal pada suatu sistem yang ada menjadi salah satu celah korupsi muncul pada masa transisi.
9. Keadaan masyarakat yang tidak baik, dimana terjadinya korupsi di birokrasi mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

⁷ Al Khair, Muhammad N. 2013. *Analisis Pola Korupsi di Lembaga Pemerintah Indonesia (Studi kasus putusan Inkracht tindak pidana korupsi dilembaga pemerintah tahun 2005-2013)*. Semarang: Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Hal. 25

⁸ Hartanti, Evi. 2012. *Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 11

⁶ Thachuk, Kimberley. 2005. *Corruption and International Security dalam SAIS Review vol. XXV no. 1 (Winter-Spring 2005)*. Baltimore: John Hopkins University. Hal. 145

Menurut hukum di Indonesia, saat ini ada tiga puluh bentuk dari korupsi. Tiga puluh bentuk ini termuat di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang diklasifikasikan ke dalam tujuh kelompok, antara lain⁹:

1. Kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan 3)
2. Suap-menyuap (Pasal 5, 6, 11, 12, 13)
3. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, 9, dan 10)
4. Pemerasan (Pasal 12)
5. Perbuatan curang (Pasal 7 dan 12)
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12)
7. Gratifikasi (Pasal 12)

Transformasi sudah terjadi pada ruang lingkup korupsi. Tindak kejahatan yang dahulunya hanya terjadi di dalam negeri saja, sekarang sudah melewati batas-batas negara yang mana hal ini dikenal dengan sebutan kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional merupakan fenomena tindak kejahatan yang melanggar hukum dan dilakukan antarindividu maupun kelompok dengan melewati batas-batas negara¹⁰. Pada tahun 1994, Sekretariat PBB mengidentifikasi setidaknya ada 18 kategori kejahatan transnasional, termasuk di dalamnya korupsi dan juga pencucian uang¹¹.

⁹ KPK. 2006. *Memahami untuk Membasmi (Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal. 20-21

¹⁰ Zagaris, Bruce. 2010. *International White Collar Crime*. Cambridge: Cambridge University Press. Hal. 145

¹¹ *Ibid.*

Menurut Abdullah Hehamahua, korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena ada tiga penyebab, yaitu sifat korupsi yang sudah transnasional, sulitnya pembuktian (pencari alat bukti dan pelaku) kasus korupsi, dampak korupsi yang luar biasa merugikan yang salah satu contohnya ada pada kerugian ekonomi¹².

Pandangan ini juga serupa dengan Mien Rukmini yang menyatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena modus, teknik, dan juga akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan korupsi yang bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan bahkan sampai ke kerusakan moral dan mental masyarakat¹³.

Kategori kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) diutarakan pertama kali oleh Edwin Sutherland yang mana ia mendefinisikan bahwa kategori kejahatan kerah putih ini berkisar terhadap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki status sosial dan kehormatan yang tinggi serta kedudukan di dalam pekerjaannya¹⁴. Korupsi termasuk ke

¹² Ramadhani, Mutia. 2012. *Inilah 3 Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa*.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/02/23/lztpqj-inilah-3-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa> diakses 9 Februari 2016

¹³ Halif. 2011. *Kejahatan Korupsi dalam Perspektif Kriminologi* dalam *Jurnal Anti Korupsi Vol. 1 No. 1*. Jember: Pukat Fakultas Hukum Universitas Jember. Hal. 1

¹⁴ Zagaris. 2011. Hal. 1

dalam kategori kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) karena adanya kesamaan karakteristik dari pelaku yang memiliki status sosial yang tinggi dan karakteristik kejahatannya yang berada di ruang lingkup pekerjaan¹⁵.

Strategi dan Sistem Pemberantasan Korupsi Indonesia

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁶.

Hal ini memerlukan strategi dan juga sistem yang tepat di dalam pelaksanaannya. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan langkah-langkah pemberantasan korupsi untuk membentuk tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pemerintah Indonesia pada tahun 2012 mengeluarkan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi: Jangka Panjang (2012-2025) dan Jangka Menengah (2012-2014) yang menjadi pedoman untuk

pemberantasan korupsi kedepannya. Strategi tersebut, antara lain¹⁷:

1. Pencegahan
2. Penegakan Hukum
3. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
4. Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset
5. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi
6. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi

Sistem pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini terbagi atas dua, yaitu sistem pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum dan Sistem Integritas Nasional (SIN). Sistem pemberantasan korupsi yang pertama pada hakekatnya melekat dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Pada sistem hukum Indonesia jika dilihat dari konteks kasus korupsi, maka ada tiga lembaga atau institusi yang terlibat di dalam pencegahan dan penindakan, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Sistem kedua adalah Sistem Integritas Nasional ini merupakan suatu sistem berskala nasional yang melibatkan seluruh pilar penting untuk berintegrasi dalam pemberantasan korupsi¹⁸.

¹⁵ Cliff, GERAL dan Desilets, Christian. 2014. *White Collar Crime: What It Is and Where It's Going* dalam *Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy* Vol. 28. Notre Dame: University of Notre Dame. Hal.482.

¹⁶ KPK. 2016. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*. <http://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu302002.pdf> diakses 13 Maret 2016

¹⁷ Pemerintah Republik Indonesia. 2012. *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi: Jangka Panjang (2012-2025) dan Jangka Menengah (2012-2014)*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia

¹⁸ *Roadmap KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tahun 2011-2023*. <http://acch.kpk.go.id/documents/10180/2146>

Pembentukan sistem ini didasarkan atas sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya. Setiap unsur atau pilar yang ada di dalam sistem ini harus memperhatikan setiap dimensi yang harus dilaksanakan untuk menjalankan Sistem Integritas Nasional ini dengan baik, yaitu peran/kontribusi (*role*), transparansi dan akuntabilitas (*governance*), dan kapasitas (*capacity*). Tujuan dari sistem ini untuk mempengaruhi agar terciptanya negara yang baik berdasarkan tatanan hukum (*rule of law*), pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dan kualitas hidup (*quality of life*)¹⁹.

Pada sistem ini posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi sebagai badan independen dan juga penggerak. Berdasarkan gambar di atas juga dapat dilihat hubungan antara KPK, Kementrian/Lembaga dan masyarakat madani (CSO) saling mendorong dan mengontrol satu dengan yang lainnya sehingga menciptakan hubungan timbal balik yang dapat menjamin sistem integritas nasional²⁰.

Sistem Integritas Nasional ini memiliki dua komponen, yaitu komponen utama dan komponen pendukung. Kedua komponen ini yang harus dipedomani di dalam sistem integritas ini. Komponen-komponen itu, antara lain :

1. Komponen utama meliputi: (a) kode etik dan pedoman perilaku,

[4/Road Map KPK.pdf/065a4a8a-e49c-46de-ae7-047099870bf5](#) diakses 17 Februari 2016

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.* Hal. 3

- (b) pengumuman harta kekayaan, (c) kebijakan grafikasi dan hadiah, (d) pengelolaan akhir masa kerja, (e) saluran pengaduan dan whistler bower, (f) pelatihan/internalisasi integritas, (g) evaluasi eksternal integritas, (h) pengungkapan isu integritas.

2. Komponen pendukung meliputi: (a) kebijakan rekrutmen dan promosi, (b) pengukuran kinerja, (c) sistem dan kebijakan pengembangan SDM, (d) pengadaan dan kontrak dengan efisiensi.

APSC: Instrumen Tambahan Pemberantasan Korupsi dalam Mengejar Kepentingan Nasional

Pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan tanpa henti mengingat keberadaan korupsi yang mengancam kepentingan nasional Indonesia secara keseluruhan. Korupsi pada saat ini sudah bertransformasi menjadi kejahatan luar biasa yang tidak hanya berfokus di dalam negeri saja, namun juga sudah bersifat transnasional.

Pendekatan pemberantasan korupsi yang komprehensif sangat dibutuhkan mengingat hal tersebut dan ini sudah terlihat pada strategi jangka menengah dan jangka panjang pemberantasan korupsi. Strategi yang dikeluarkan pemerintah tidak hanya memperkuat instrumen-instrumen pemberantasan korupsi dalam negeri, namun juga memperhatikan dan memperkuat sektor kerja sama internasional dan penyelamatan aset-aset negara yang dibawa lari ke luar negeri.

Pada tahap pengimplementasian berbagai strategi yang dirancang, Indonesia diharuskan memperkuat instrumen-instrumen yang dimilikinya dan bahkan jika memungkinkan untuk membentuk instrumen tambahan yang dapat memperkuat sistem pemberantasan korupsi Indonesia. Instrumen tersebut dapat berupa apa saja, seperti lembaga negara atau juga kerja sama internasional yang menjadi salah satu jalan dalam pemberantasan korupsi. Pada penelitian ini, hal tersebut difokuskan terhadap pembentukan dan pelaksanaan ASEAN *Political-Security Community*.

Agenda pemberantasan korupsi Indonesia jelas merupakan bagian dari kepentingan nasional. Kepentingan nasional tidak dapat dilepaskan dari hal yang menjadi dorongan ataupun dasar dari suatu negara untuk melakukan sesuatu. Menurut Donald E. Nuchterlain kepentingan nasional merupakan kebutuhan yang dirasakan oleh suatu negara dalam hubungan dengan negara lain yang merupakan lingkungan eksternalnya²¹. Definisi ini lebih merujuk kepada tindakan suatu negara terhadap negara lain.

Ketika kepentingan nasional suatu negara sudah terancam dan terhalang oleh suatu isu, terlebih lagi jika isu tersebut berdampak luas dan membahayakan, maka negara tersebut dapat menjadi suatu negara

²¹ Prayuda dan Harto. 2012. *Strategi Indonesia Menghadapi Kebijakan Malaysia di Wilayah Perbatasan Tahun 2006-2010* dalam *Jurnal Transnasional*, Vol.4 no. 1, Juli 2012. Pekanbaru: Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau. Hal. 705

yang gagal (*Failed State*). Kepentingan nasional setidaknya dapat dibagi atas empat klasifikasi, yaitu melalui *national content*, rentang waktu, tingkat kegentingan, dan ruang lingkupnya²².

Pada bagian pertama, terdapat empat bidang, yaitu politik, ekonomi, keamanan dan budaya²³. Kepentingan politik terhadap pemberantasan korupsi berkaitan dengan jalannya tata kelola pemerintahan yang baik. Keberadaan pemerintah yang ada untuk rakyatnya akan terganggu akibat adanya korupsi. Tatanan atau sistem politik yang idealnya menurut David Easton memiliki alur *input* (masukan berupa tuntutan dan dukungan), proses, *output* (kebijakan), serta *feedback* (umpan balik)²⁴ akan sulit untuk tercapai.

Perilaku korupsi pada sistem politik Indonesia dapat merusak mekanisme sistem politik yang sudah ada tersebut. Alur masuk (*Input*) yang seharusnya berdasarkan kepentingan nasional dan berujung (*Output*) untuk memenuhi kepentingan tersebut menjadi hilang karena digantikan kepentingan pribadi dan golongan. Jumlah kasus korupsi yang tidak sedikit di pemerintahan menimbulkan banyak hal, seperti ketidakpuasan dan berkurangnya kepercayaannya

²² Yan, Xuotong. 2002. *Analysis of China's Interest*. Monterey: Middlebury Institute of International Studies - James Martin Center for Nonproliferation Studies. Hal. 19

²³ *Ibid.*

²⁴ Mas'ood, Mochtar dan MacAndrews, Colin. 2008. *Perbandingan Sistem Politik*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 5

terhadap pemerintah yang mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Kepentingan ekonomi juga menjadi pertimbangan Indonesia. Kerugian terhadap keuangan negara pada rentang waktu 2004-2014 mencapai Rp. 39,3 triliun²⁵. Menurut Pratikno, nilai biaya eksplisit korupsi selama tahun 2012 sebesar Rp. 168,19 triliun dan uang hasil korupsi yang dikembalikan ke negara hanya Rp. 15,09 triliun atau hanya sekitar 8,7 %. Nilai eksplisit yang hilang sebesar Rp. 153,1 triliun dan hal ini juga masih perlu ditambah biaya implisit yang diperkirakan mencapai Rp. 250 triliun²⁶.

Setidaknya ada lima sektor yang rentan terhadap korupsi, yaitu infrastruktur keuangan daerah, pendidikan, sosial kemasyarakatan dan kesehatan²⁷. Kelimanya berpengaruh terhadap kepentingan ekonomi Indonesia. Terhambatnya terhadap sektor-sektor tersebut berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Menurut Irvan Susandy,

²⁵ Rhismawati, Ni Luh. 2015. *Istri Pejabat Diingatkan Jangan Konsumtif*. <http://www.antarane.ws.com/berita/526580/istri-pejabat-diingatkan-jangan-konsumeratif> diakses 24 Februari 2016

²⁶ Gusti. 2013. *Uang Negara Hilang Rp 250 triliun Akibat Korupsi*. http://ugm.ac.id/en/berita/8043-uang_negara.hilang.rp.250.triliun.akibat.korupsi diakses 3 November 2014

²⁷ *Tren Pemberantasan Korupsi*. <http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Kajian/Trend%20Korupsi%20Tahun%202014.pdf> diakses 13 Februari 2016

pembangunan infrastruktur sangat vital terhadap pertumbuhan ekonomi karena pada dasarnya infrastruktur dapat mendukung kelancaran perputaran ekonomi²⁸.

Kepentingan selanjutnya adalah kepentingan keamanan. Keamanan menentukan keberlangsungan dan jatuhnya suatu negara di dunia. Tanpa adanya hal ini, negara sama saja menjadi suatu hal yang tidak ada karena salah satu fungsi negara adalah menjaga keselamatan dan keamanan dalam membentuk negara yang sejahtera dan makmur. Menurut Barry Buzan ada lima dimensi yang di dalam keamanan, yaitu *Military*, *Political*, *Economic*, *Societal*, dan *Environmental*²⁹.

Korupsi menyebabkan ketidakstabilan, ketidakadilan, kerapuhan atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat juga berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Hasil dari ketidakpercayaan masyarakat dan ketidakstabilan politik adalah gerakan sosial perubahan, peningkatan kriminalitas hingga ke gerakan pemisahan (*Separatism*) atau pendirian negara baru (*State Formation*) yang melibatkan konflik militer.

Selain itu, korupsi juga menghambat laju perekonomian nasional. Hal ini dapat berdampak terhadap meningkatnya kemiskinan

²⁸ Hasil wawancara bersama Kepala Divisi Bursa Efek Indonesia, Irvan Susandy pada 11 Januari 2016 di Jakarta Selatan.

²⁹ William, Paul. 2008. *Security Studies: An Introduction*. London: Routledge. Hal. 4

masyarakat yang juga berujung kepada peningkatan kriminalitas. Lingkungan juga tidak terlepas dari penyalahgunaan wewenang para koruptor, contoh dalam pengelolaan maupun eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak memikirkan tentang kelestarian alam yang mana hal ini bisa menyebabkan bencana alam dan polusi.

Indonesia merupakan negara yang berideologikan Pancasila. Pancasila merupakan prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam berbangsa dan bernegara oleh seluruh komponen negara Indonesia yang berakar dari nilai-nilai kebudayaan nasional yang telah dipraktekkan oleh para leluhur sejak dahulu³⁰.

Ketika korupsi terjadi, maka korupsi melanggar prinsip-prinsip yang ada di Pancasila tersebut. Pelanggaran terhadap hal tersebut bukanlah hal yang main-main karena melanggar dasar negara yang berakar dari kebudayaan yang sudah ada sejak dulu. Oleh karena itu, kewajiban dan kepentingan seluruh komponen bangsa Indonesia untuk mengembalikan Pancasila secara utuh sebagai pedoman negara di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara³¹.

Pemberantasan korupsi merupakan kepentingan jangka panjang Indonesia. Hal ini sesuai dengan betapa beratnya masalah korupsi yang terjadi di Indonesia dan juga tujuan untuk memenuhi cita-cita

yang tertuang di dalam UUD 45. Penyesuaian terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, mekanisme, dan strategi pemberantasan korupsi yang telah dibentuk membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, serta keseriusan dari pemerintahan dan masyarakat.

Jika melihat betapa besarnya pengaruh korupsi dalam bidang politik, ekonomi, keamanan dan budaya maka dapat diambil kesimpulan sederhana bahwa pemberantasan korupsi merupakan suatu kepentingan nasional yang memiliki nilai vital dan harus segera untuk dilaksanakan. Pemberantasan korupsi menyangkut terhadap keberlangsungan Indonesia sebagai suatu negara jika dilihat dari beberapa hal yang sebelumnya penulis paparkan.

Pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat nasional namun juga harus bersifat internasional. Kepentingan untuk memberantas korupsi ini idealnya harus didukung oleh masing-masing negara dan menjadi suatu kepentingan bersama (*Common Interest*) karena secara rasional negara membutuhkan bantuan negara lain untuk menyelesaikan suatu, terutama jika masalah tersebut bersifat transnasional. Oleh karena itu, ruang lingkup dari korupsi saat ini menjadi universal dan harus dilakukan oleh setiap negara.

APSC merupakan salah pilar dalam ASEAN *Community* yang berfokus terhadap kerja sama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang politik-keamanan. Kerja sama ini merupakan bagian dari

³⁰ Hasil wawancara dengan Suwardi Mohammad Samin. 13 Maret 2016. Pekanbaru

³¹ *Ibid.*

kepentingan nasional masing-masing negara anggota ASEAN yang diselaraskan menjadi suatu kepentingan bersama dan khusus untuk komunitas ini berfokus kepada bidang politik-keamanan. Kerja sama merupakan elemen penting dalam kebijakan politik luar negeri suatu negara, termasuk Indonesia yang mana hal ini dapat memenuhi kepentingan nasionalnya sekaligus kepentingan bersama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya³².

APSC merupakan bentuk peningkatan kerja sama yang menggunakan pendekatan komprehensif di dalam bidang politik dan keamanan, termasuk pemberantasan korupsi. Kerja sama di dalam komunitas ini sebenarnya terbagi ke dalam tiga bidang, yaitu politik, keamanan dan hukum. Jika dilihat di dalam kerja sama tersebut, pemberantasan korupsi termasuk ke dalam tiga bidang tersebut. Jika difokuskan, maka akan terlihat seperti berikut³³:

a) Politik

- 1) Memajukan pemerintahan yang baik.
- 2) Memajukan prinsip-prinsip demokrasi.

b) Keamanan

- 1) Penanganan isu keamanan non-tradisional
 - 2) Pemajuan transparansi dan pemahaman mengenai kebijakan pertahanan dan persepsi keamanan.
- c) Hukum
- 1) Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
 - 2) Pembentukan kerja sama penanganan kejahatan lintas batas.
 - 3) Pembentukan kerja sama dalam isu ekstradisi.
 - 4) Peratifikasian Traktat tentang Bantuan Hukum Terkait Masalah-masalah Kriminalitas (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLAT*).

Komunitas politik-keamanan ASEAN ini dapat dianggap sebagai instrumen keamanan tambahan bagi Indonesia di dalam pemberantasan korupsi³⁴. Mengapa demikian? Peningkatan kerja sama yang dilakukan melalui komunitas ini dapat memperkuat kinerja lembaga yang berwenang dan terkait di dalam pemberantasan korupsi dan juga permasalahan keamanan non tradisional. Peningkatan ini bisa dari *capacity building*, mengelola pemerintahan yang baik dan juga penindakan hukum yang menggunakan instrumen kerja sama di dalam APSC.

³² Oratmangun, Djauhari. 2010. *ASEAN Community 2015: Menuju ASEAN Baru yang Integratif dan Berwawasan ke Depan*. <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issue/76-januari-2010/695-asean-community-2015-menuju-asean-baru-yang-integratif-dan-berwawasan-ke-depan.html> diakses 26 Maret 2016

³³ Kemlu. 2010. *ASEAN Selayang Pandang (Edisi ke-19)*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Hal. 22-23

³⁴ Hasil wawancara dengan *Technical Officer ASEAN Political-Security Community* yang diwawancarai oleh penulis pada 14 Januari 2016 di Sekretariat ASEAN, Jakarta.

Upaya Indonesia dalam Pembentukan ASEAN Political-Security Community (APSC)

Pembentukan Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN berdasarkan atas gagasan dari pihak Indonesia³⁵. Gagasan pembentukan ini diusulkan pada April 2002 dan Indonesia menginginkan agar APSC menjadi komunitas yang berorientasi kepada dukungan terhadap demokrasi, menghormati Hak Asasi Manusia, menjadikan *good governance* sebagai nilai utamanya dan tidak melupakan tentang pentingnya kedamaian dan *conflict resolution* dengan cara yang damai³⁶.

Perumusan tentang konsep pembentukan APSC dimulai dari inisiasi awal ASEAN *Vision 2020*, perumusan Komunitas ASEAN, pelaksanaan dan berbagai proses lainnya. Menurut Hassan Wirajuda, Indonesia memandang dalam pembentukan Komunitas ASEAN tidak bisa hanya diorientasikan untuk memenuhi tujuan dalam satu bidang saja, terutama ekonomi, namun juga harus mencakup bidang-bidang yang lainnya juga. Hal ini berdasarkan pengalaman Indonesia yang pernah memfokuskan pertumbuhan di sektor ekonomi saja, sehingga menciptakan ketidakseimbangan yang membuat Indonesia berada di ambang kehancuran. Oleh karena itu, Indonesia mengajukan usulan untuk

membentuk ASEAN *Political-Security Community* ini untuk menyeimbangkan fokus di dalam Komunitas ASEAN³⁷.

Indonesia ikut mempelopori penyusunan Cetak Biru dari komunitas ini yang terdiri atas tiga karakteristik, antara lain, yaitu Komunitas Berbasis Aturan dengan Nilai dan Norma Bersama, Sebuah Wilayah Terpadu, Damai dan Tangguh dengan Tanggung Jawab Bersama untuk Keamanan Menyeluruh, serta Kawasan yang Dinamis dan Berpandangan Keluar dalam Dunia yang Semakin Terintegrasi dan Saling Bergantung³⁸.

Indonesia juga memberikan usulan di dalam pembentukan komunitas ini yang disepakati oleh negara-negara anggota lainnya, antara lain³⁹:

- a) Mendorong pengamatan pemilihan umum sukarela.
- b) Membentuk Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak.
- c) Memasukkan elemen memerangi korupsi dan pemajuan prinsip demokrasi.
- d) Menggagas pembentukan *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation*.
- e) Menggagas pembentukan *ASEAN Maritime Forum*.
- f) Membentuk kerja sama penanganan *illegal fishing*.
- g) Menyusun instrumen ASEAN tentang Hak Pekerja Migran.

³⁵ Kemlu. 2012. *ASEAN Selayang Pandang (Edisi ke-20)*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Hal. 6

³⁶ Wirajuda, Hassan. 2015. *ASEAN Beyond 2015: What Does it Mean To be A Community? (ASEAN's Community Building Process)*. Kuala Lumpur: 29th Asia-Pacific Roundtable. Hal. 2

³⁷ Wirajuda, Hassan. 2015. Hal. 1-2

³⁸ Kemlu. 2010. Hal. 21

³⁹ *Ibid.* Hal. 22

Komunitas ini disepakati memiliki beberapa agenda yang dimuat ke dalam beberapa pasal. Jika memfokuskan kepada perihal korupsi dan kejahatan transnasional, maka dapat dilihat dari beberapa pasal yang ada di dalam Cetak Biru tersebut, yaitu pasal tentang *good governance*, pemberantasan korupsi⁴⁰, dan penanganan masalah keamanan non tradisional⁴¹.

III. SIMPULAN

Kerja sama internasional dapat dijadikan instrumen yang membantu menjaga kepentingan nasional Indonesia. Indonesia menjadi penggagas dalam pembentukan APSC yang memfokuskan masalah-masalah politik-keamanan ini. Kerja sama yang ada di dalam komunitas tersebut merupakan kompilasi dari kerja sama yang sudah ada sebelumnya tentang masalah-masalah yang difokuskan dan juga masalah-masalah terbaru yang berkaitan yang salah satunya adalah korupsi.

Komunitas ini dapat menjadi kerangka, acuan, dan dorongan bagi Indonesia melalui lembaga-lembaga negara yang terkait dengan permasalahan korupsi untuk melaksanakan kerja sama di dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, terbentuknya komunitas ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat menyeleraskan kepentingan nasionalnya terhadap kepentingan

bersama negara-negara anggota ASEAN lainnya.

REFERENSI

Jurnal, Research Paper, dan Artikel Ilmiah

- Al Khair, Muhammad N. 2013. *Analisis Pola Korupsi di Lembaga Pemerintah Indonesia (Studi kasus putusan Incracht tindak pidana korupsi dilembaga pemerintah tahun 2005-2013)*. Semarang: Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Cliff, Geral dan Desilets, Christian. 2014. *White Collar Crime: What It Is and Where It's Going* dalam *Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy* Vol. 28. Notre Dame: University of Notre Dame
- Halif. 2011. *Kejahatan Korupsi dalam Perspektif Kriminologi* dalam *Jurnal Anti Korupsi* Vol. 1 No. 1. Jember: Pukat Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Prayuda dan Harto. 2012. *Strategi Indonesia Menghadapi Kebijakan Malaysia di Wilayah Perbatasan Tahun 2006-2010* dalam *Jurnal Transnasional*, Vol.4 no. 1, Juli 2012. Pekanbaru: Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau
- Thachuk, Kimberley. 2005. *Corruption and International Security* dalam *SAIS Review*

⁴⁰ ASEAN. 2009. *ASEAN Political-Security Community Blueprint*. Jakarta: ASEAN Sekretariat. Hal. 4 dan 6.

⁴¹ *Ibid.* Hal. 12

vol. XXV no. 1 (Winter-Spring 2005). Baltimore: John Hopkins University.

Wirajuda, Hassan. 2015. *ASEAN Beyond 2015: What Does it Mean To be A Community? (ASEAN's Community Building Process)* Kuala Lumpur: 29th Asia-Pacific Roundtable.

Yan, Xuetong. 2002. *Analysis of China's Interest*. Monterey: Middlebury Institute of International Studies - James Martin Center for Nonproliferation Studies

Buku

Hartanti, Evi. 2012. *Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika

Kamil, Sukron. 2013. *Korupsi dan Integritas dalam Ragam Perspektif*. Jakarta: PSIA UIN Syarif Hidayatullah.

Kemlu. 2010. *ASEAN Selayang Pandang (Edisi ke-19)*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Kemlu. 2012. *ASEAN Selayang Pandang (Edisi ke-20)*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

KPK. 2006. *Memahami untuk Membasmi (Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi

Mas'ood, Mochtar dan MacAndrews, Colin. 2008. *Perbandingan Sistem Politik*. Jogjakarta:

Gadjah Mada University Press.

Murray, Robert W. 2013. *System, Society & the World: Exploring the English School of International Relations*. Bristol: E-International Relations.

William, Paul. 2008. *Security Studies: An Introduction*. London: Routledge.

Zagaris, Bruce. 2010. *International White Collar Crime*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hasil Wawancara

Technical Officer of APSC. 2016. *Wawancara tentang ASEAN Political-Security Community pada 14 Januari 2016*. Jakarta: Sekretariat ASEAN.

Susandy, Irvan. 2016. *Wawancara tentang Kepentingan Ekonomi dan Komunitas ASEAN pada 11 Januari 2016*. Jakarta Selatan.

Suwardi. 2016. *Wawancara tentang Kepentingan Budaya Indonesia pada 13 Maret 2016*. Pekanbaru.

Dokumen Resmi

ACCH-KPK. 2016. *Roadmap KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tahun 2011-2023*. KPK.go.id (http://acch.kpk.go.id/documents/10180/21464/Road_Map_KPK.pdf/065a4a8a-e49c-46de-ae7-047099870bf5) diakses 17 Februari 2016

ASEAN. 2009. *ASEAN Political-Security Community Blueprint*. Jakarta: ASEAN Secretariat

KPK. 2016. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*. KPK.go.id (<http://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu302002.pdf>) diakses 13 Maret 2016

Pemerintah Republik Indonesia. 2012. *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi: Jangka Panjang (2012-2025) dan Jangka Menengah (2012-2014)*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia

Website Primer

Oratmangun, Djauhari. 2010. *ASEAN Community 2015: Menuju ASEAN Baru yang Integratif dan Berwawasan ke Depan*. TabloidDiplomasi.org (<http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issuue/76-januari-2010/695-asean-community-2015-menuju-asean-baru-yang-integratif-dan-berwawasan-kedepan.html>) diakses 26 Maret 2016

ICW. 2015. *Tren Pemberantasan Korupsi*. ICW (<http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Kajian/Trend%20Korupsi%20Tahun%202014.pdf>) diakses 13 Februari 2016

Transparency International. 2015. *Corruption Perceptions Index*. Transparency.org

(<http://www.transparency.org/research/cpi>) diakses 15 April 2015

Website Sekunder

Badudu, Ananda. 2012. *Ribuan Pejabat Daerah Terlibat Kasus Korupsi*. Tempo.co (<http://tempo.co/read/news/2012/08/29/07842651/Ribuan-Pejabat-Daerah-Terlibat-Kasus-Korupsi>) diakses pada 2 November 2014

Gusti. 2013. *Uang Negara Hilang Rp 250 triliun Akibat Korupsi*. UGM.ac.id (<http://ugm.ac.id/en/berita/8043-uang.negara.hilang.rp.250.triliun.akibat.korupsi>) diakses 3 November 2014

Ramadhani, Mutia. 2012. *Inilah 3 Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa*. Republika.co.id (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/02/23/lztpqj-inilah-3-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa>) diakses 9 Februari 2016

Rhismawati, Ni Luh. 2015. *Istri Pejabat Diingatkan Jangan Konsumtif*. Antaranews.com (<http://www.antaranews.com/berita/526580/istri-pejabat-diingatkan-jangan-konsumeratif>) diakses 24 Februari 2016